

**PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PROSES PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA (Studi Kasus KEPOLISIAN RESOR PARIGI  
MOUTONG)**

**ZAINUDDIN/ D 101 11 340**

**PEMBIMBING I : DR. RIDWAN TAHIR, S.H.,M.H.**

**PEMBIMBING II : DR. HJ. KARTINI MALARANGAN, S.H.,M.H.**

**Abstrak**

*Kepolisian yang mempunyai tugas-tugas seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penangkapan, tetapi kadang kepolisian dalam melakukan tugasnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. tetapi banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak mengetahui ataupun tidak diberitahu bahwa sesungguhnya mereka mempunyai hak-hak sebagai tersangka (Prinsip Miranda rule) sebagaimana di atur dalam banyak pasal di KUHAP, sesungguhnya mengabaikan hak-hak tersangka merupakan hal yang sangat fatal apabila dilakukan oleh polisi karena dapat mengakibatkan proses-proses penegakan hukum yang sudah dilakukan dari awal bisa dijadikan celah untuk tersangka melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga berakibat semua proses-proses seperti penangkapan dan pemeriksaan sampai dengan dakwaan sekalipun dinyatakan tidak sah oleh hakim. Seperti kasus kasus yang terjadi bahwa hakim memutuskan dalam amar putusanya “menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang di dalam berita acara penyidikan (BAP), telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu batal demi hukum” Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan asas ini sangatlah penting sehingga haruslah kepada anggota kepolisian yang melakukan tugasnya harus paham dengan Prinsip Miranda rule dan memperhatikan hak-hak mereka yang dijadikan tersangka.*

**Kata kunci : Asas, Hak, KUHAP, Polisi dan Tersangka.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 3.

setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Negara hukum (*rechtstaat*) berbeda dengan Negara *Anglo Saxon* (*machtstaat*). Negara *Anglo Saxon* tidak mengenal Negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau

menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.

Perspektif yuridis normatif, hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang dan pusat pertumbuhan hukum ada di dalam perundang-undangan.

Secara perspektif sosiologis empiris, hukum tidak dibentuk oleh penguasa melainkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum ialah adanya lembaga peradilan. Lembaga ini merupakan syarat bagi suatu Negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum. Kehadiran lembaga peradilan di alam merdeka ini tidak sekedar menunjukkan bahwa model-model peradilan Hindia Belanda yang cenderung memihak dan kurang objektif telah ditinggalkan, melainkan

juga sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hadirnya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan aturan hukum atau Undang undang Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penegakkan hukum dan keadilan bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh professional yang bersangkutan, agar tidak terjadi suatu hal yang fatal yang mengakibatkan ketidakadilan bagi seseorang.<sup>2</sup>

Negara Arizona, Amerika Serikat, asal muasal dari prinsip ini ialah ,seorang pemuda yang bernama

Ernesto Arturo Miranda, ditangkap oleh polisi pada Maret 1963 karena dugaan melakukan tindak pidana perampokan. Pada saat ditangkap, Miranda tidak pernah diberitahu hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum/advokat. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Miranda mengakui perbuatannya secara tertulis. Akhirnya berkas perkara Miranda dilimpahkan ke pengadilan. Hakim menyimpulkan Miranda terbukti bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Ia dan penasehat hukumnya keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung AS (Amerika Serikat). Upaya hukum yang dilakukan Miranda ternyata tidak sia-sia. Mahkamah Agung menanggukuhkan hukuman terhadapnya dengan alasan proses hukum dan pengakuan yang dibuat Miranda tanpa terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya selaku tersangka adalah tidak sah. Sejak itu, putusan kasus Miranda menjadi putusan yang cukup terkenal di Amerika Serikat

(AS), dan selalu dipatuhi serta diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Kaidah hukum dalam putusan ini kemudian terkenal dengan sebutan *Miranda Rule*.

Amerika Serikat yang merupakan asal muasal dari istilah *Miranda Rule* ini, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri atas: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat.<sup>3</sup>

Di Indonesia Prinsip *Miranda Rule* diatur di dalam Pasal 54, 55, 56 Ayat (1) dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Miranda Rule* yang ada di Indonesia merupakan adopsi dari Negara Amerika Serikat, tetapi dalam

prakteknya tidak sepenuhnya asas *Miranda Rule* yang diterapkan di Amerika Serikat juga diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Secara khusus prinsip *Miranda Rule* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menentukan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka”.<sup>4</sup>

Tujuan prinsip *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm 33.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, Pasal 56 Ayat (1)

hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, kekuasaan hukum tidak dapat direduksikan menjadi suatu perangkat pasti dan aturan-aturan konkrit yang diikuti atau dilanggar, melainkan lebih dengan nilai-nilai lain pertanyaan apakah di beberapa negara atau beberapa daerah hubungan sosial kekuasaan hukum berpengaruh atau tidak. Hal ini selalu akan merupakan pertanyaan lebih atau kurang. Tidak ada satu negara pun. Di Timur atau di Barat, yang kekuasaan hukumnya dapat tercapai sepenuhnya.<sup>5</sup>

Kenyataan yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Tersangka pada saat ditangkap tidak langsung

diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Pemberitahuan baru dilakukan pada saat pemeriksaan dimulai, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan penasihat hukum atau advokat tentang perkara yang sedang dihadapinya. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas saja.

hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah kewilayah kebebasan orang lain.<sup>6</sup>

Adapun pembahasan dan Penerapan yang menerangkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :

1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi “*universal*” HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa

---

<sup>5</sup> Syukri Akub, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012. Hlm 152

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 56.

merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM;

2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan adalah tidak

sah atau batal demi hukum (*null and void*).<sup>7</sup>

Dapat di simpulkan bahwa penyidik secara langsung mengkondisikan tersangka hingga proses penyidikan ada yang di dampingi dan tidak di dampingi oleh pengacara dan tidak punya pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran *Miranda Rule* di Indonesia karena belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para penegak hukum maupun pemimpin Negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga sangat terkesan pelanggaran itu dibiarkan. Di Amerika Serikat, pelanggaran terhadap *Miranda Rule* akan mengakibatkan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka tidak sah.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327

Prinsip *Miranda rule* yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, yaitu sangat diperlukannya penegakan hukum atas pelanggaran Prinsip *Miranda Rule* ini. Langkah penegakan ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para pejabat pada semua tingkat peradilan yang menjalankan profesinya di Indonesia. Berdasarkan kenyataan dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“Penerapan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi Moutong)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan :

1. Bagaimanakah penerapan Prinsip *Miranda Rule* di dalam proses penyidikan perkara pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Parigi Moutong?
2. Bagaimanakah pemberian sanksi terhadap oknum penegak hukum yang mengabaikan Prinsip

*Miranda Rule* di wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Parigi Moutong**

Parigi Moutong sebagai salah satu kota yang mempunyai kepadatan penduduk berjumlah 522.026 jiwa, dan memiliki luas wilayah 6.231,85 Ha. Dengan batas wilayah sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo, sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Tomini.

Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) tersangka wajib didampingi penasehat hukum.

Beberapa hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara,
- b. Hak persiapan pembelaan,
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan,
- d. Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung, disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan landasan prinsip “*Legalitas*” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.

Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, terdakwa atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan adalah tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).<sup>8</sup>

Dalam hal pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena terdakwa bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327



(Surat Keputusan Kapolri tanggal 11 September 2000 No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana).

Dalam proses perkara pidana pada dasarnya ada tiga instansi penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pidana antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (NRI) selaku penyidik khususnya di wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang memaksa dan memutuskan hukumannya. Dalam pada itu seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan karena diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kedudukannya yang demikian itu ia berstatus sebagai tersangka akan tetapi bilamana seseorang tersebut berada dalam proses penuntutan oleh kejaksaan sampai pada taraf pemeriksaan di pengadilan tetapi belum sampai vonis Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka ia statusnya sebagai terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan hak tersangka, penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan, sehingga Kepolisian Resor Parigi Moutong dalam tahap pemeriksaan penyidikan perkara pidana hak tersangka didahulukan, tersangka pada saat ditahan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, dan mendapat perlakuan tekanan yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya. Hak tersangka dalam proses pemeriksaan diberitahukan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dan berhak untuk berkomunikasi dan mendapat akses untuk berhubungan dengan keluarga, sehingga tersangka atau terdakwa tidak cenderung mendapat tekanan karena dalam proses penyidikan terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Dan apabila tersangka tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang berhak bertanggung jawab atas penahanannya, serta berhak memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami, jika mungkin disediakan penerjemah tanpa di pungut biaya untuk proses pengadilan

selanjutnya, dan sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang, ada pula tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasehat hukumnya.

Namun, pada kenyataannya Kepolisian Wilayah Parigi Moutong tidak sepenuhnya menerapkan Prinsip *Miranda Rule*, dikarenakan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan tersangka hak yang di berikan tidak semuanya di berlakukan. Pihak Kepolisian Resor Parigi Moutong memberikan hak tersangka dengan di beritahukan apakah ingin di dampingi oleh panasehat Hukum atau Advokat, namun hal tersebut tidak sepenuhnya tersangka terima karena Bantuan Hukum tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Karena di wilayah Hukum Kepolisian Resor Parigi Moutong Khususnya Kota Parigi belum mempunyai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ingin memberikan bantuannya secara cuma-cuma, dan Lembaga Bantuan Hukum tersebut

hanya terdapat di wilayah Tingkat Provinsi, karena mayoritas penduduk di wilayah Parigi Moutong adalah masyarakat menengah ke bawah, hingga setiap kasus yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Parigi Moutong masih cenderung mengabaikan hak yang seharusnya di berikan kepada tersangka. Hingga Prinsip *Miranda Rule* ini sendiri sangat bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalamnya “ dan jika tidak mampu maka berhak disediakan penasehat Hukum/Advokat”.

Makna yang terkandung dalam Asas Praduga Tidak Bersalah (APTb) sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*Due Process Of Law*), yang mencakup beberapa substansi :

- a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
- b) Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa

- c) Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia, dan

Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya<sup>9</sup>

**B. Pemberian Sanksi Bagi Oknum Penegak Hukum Yang Mengabaikan Prinsip *Miranda Rule* di Wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong.**

Dalam hal ini prinsip *Miranda Rule* sangat berkaitan dengan hal yang melanggar hak tersangka, karena telah tertulis bahwa “tersangka sebelum diinterogasi harus di berikan informasi secara jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bias digunakan untuk melawannya (memberatkan)”.

Namun, dari ketentuan tersebut pihak Kepolisian Resor Parigi Moutong telah melanggar apa yang ada di dalam

Prinsip *Miranda Rule*, karena tidak menjalankan apa yang telah tertulis didalam Prinsip tersebut.

Seperti kasus penangkapan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tersangka Sabarudin Alias Andi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka pada tanggal hari selasa 03 November 2015 di kediamannya di Desa Pambalowo beliau mengatakan : Desa Pambalowo Kec.Parigi Kab. Parigi Moutong, : dirinya ditangkap saat berada di Desa Lemusa di tempat keluarganya pada tanggal 29 Desember 2012, tiba-tiba ia di datangi oleh pihak kepolisian Buser Resort Parigi dengan berpakaian biasa berjumlah lima (5) orang mereka langsung menangkap tersangka tanpa adanya surat pemberitahuan penangkapan, saat tersangka ditangkap oleh pihak Tim Buser Kepolisian Resor Parigi Moutong, terdakwa bertanya, mengapa saya ditangkap, dan pihak kepolisian menjawab anda tidak usah banyak bertanya karena anda sudah jelas bersalah melakukan pencurian. Dan tersangka melakukan perlawanan karena tersangka tidak tahu masalah

---

<sup>9</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*, PT.Alumni, Bandung 2007. Hlm 167

sehingga melakukan perlawanan karena tidak ada surat penangkapan, kemudian tersangka diguling oleh Tim Buser, tapi kemudian tersangka berlari dan melompat ke arah gunung yang letaknya tidak jauh dari lokasi dirinya, namun hal itu tidak lama untuk dirinya karena Tim Buser melakukan penembakan ke arah dirinya secara membabi buta tanpa adanya tembakan peringatan, dan tersangka menyerah dan di bekuk oleh Tim Buser Kepolisian Resor Parigi Moutong.

Kemudian sesampainya di jalur dua tersangka ditanya, apakah anda yang melakukan pencurian di Desa Mertasari, dan tersangka menjawab tidak melakukan pencurian di Desa Mertasari, dan pada saat itu dalam keadaan di borgol tersangka di tembak dibetis sampai tembus dengan menutup ujung senjata dengan botol air mineral dan di pukuli hingga berdarah namun tersangka belum juga menjawab karena dirinya tidak tahu dengan masalah yang terjadi. sesampainya di kantor polisi tersangka masih di periksa oleh pihak kepolisian, dengan terpaksa dirinya mengakui dengan mengarang kejadian

yang sebenarnya dia tidak tahu sama sekali, karena dari pihak kepolisian mengancam akan menembak lagi kakinya jika tidak memberitahu, akhirnya tersangka memberi keterangan palsu kepada pihak kepolisian karena mendapat tekanan dan masih ketakutan dengan ancaman yang diberikan.

Setelah satu minggu penangkapan tersangka, tersangka Rizki Alias Iki dengan teman-temannya yang sebenarnya akhirnya ditangkap, namun dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan hal yang tidak baik, tersangka yang sesungguhnya selaku perampokan di Desa Mertasari telah memberi keterangan palsu, karena dari pihak kepolisian juga telah mengancam mereka agar tidak mengakui perampokan yang mereka lakukan di Desa Mertasari agar Sabarudin Alias Andi'lah yang sebenarnya pelaku perampokan.

Dalam hal ini tersangka Sabarudin Alias Andi mendapatkan penasehat hukum, akhirnya tersangka berani memberi keterangan yang sebenar-benarnya, karena dirinya sudah tidak sendiri lagi, akhirnya

memberanikan diri untuk memberi keterangan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan perampokan di Desa Mertasari. Dan pelaku perampokan yang sebenarnya akhirnya memberikan keterangan bahwa merekalah yang melakukan perampokan di Desa Mertasari bersama ke Enam teman-temannya dan mereka di paksa untuk berbohong agar tidak memberi keterangan yang sebenarnya, karena dari pihak kepolisian telah memberitahu kepada mereka akan di bantu dan diringankan penahanannya. Dan akhirnya Baharudin Alias Andi dinyatakan bebas dari dakwaan dan keterangan-keterangan saksi yang membenarkan maka terhadap diri tersangka haruslah dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya, dan dinyatakan bebas dan tersangka tidak terbukti bersalah secara sah.<sup>10</sup>

Dari kasus tersebut diatas telah terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka dan dari hasil wawancara

yang saya dapatkan di wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong, dari keterangan Kepala Kasat Reskrim Ibtu Dadi Rahma Putra mengatakan, dari beberapa kasus perkara pidana yang mereka tangani selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya saat pemeriksaan adalah sebagian dari proses yang sebenarnya, karena tersangka pada saat ditanyai mengelak, dan melawan sehingga anggota kami melakukan tindakan pemaksaan.

Dari keterangan wawancara, terjadinya pelanggaran yang ditimbulkan oleh anggota kami dikarenakan dari pihak tersangka tidak bisa memberikan keterangan secara jelas, sehingga anggota kami dari Kepolisian Resor Parigi Moutong melakukan hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan.

Dalam hal ini anggota kami yang telah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi, yang digolongkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dari jenis sanksinya.

#### Sanksi Pidana

#### Peraturan disiplin Polri

---

<sup>10</sup> Data Wawancara dari korban salah tangkap Sabarudin Alias Andi, Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, selasa 03 november 2015.

Etika profesi kepolisian atau sanksi Administratif.

Dan dalam hal ini anggota yang telah kami dapatkan melakukan kontak fisik dan mengabaikan hak tersangka selama proses pemeriksaan tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara administratif berupa pemeriksaan yang intensif oleh pengawas penyidik, dan pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dan teguran tertulis serta tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara. Dan pegawai Kepolisian Resor Parigi Moutong juga dikenakan sanksi tindakan skorsing dan larangan untuk melakukan kegiatan dalam periode tertentu dan diberikan sanksi tindakan pengguguran dari tugas penyidikan.

Selanjutnya, anggota Kepolisian melakukan pelanggaran telah berikan sanksi penempatan dalam tempat khusus yaitu satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Resor Parigi Moutong yang telah melakukan

pelanggaran, yang di tempatkan di tempat khusus dan diberi hukuman selama 21 hari kurungan dan anggota tersebut di pisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.

lebih lanjut anggota Kepolisian Resor Parigi Moutong yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap perkara pidana telah dijatuh hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu, penundaan kenaikan pangkat serta mutasi dan pembebasan dari jabatan, dan sanksi yang diberikan kepada pegawai penyidik Wilayah Hukum Kepolisian Resor Parigi Moutong adalah yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dikenakan hukuman tindakan pengguguran dari tugas penyidikan dan pembebasan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan dan saat ini anggota tersebut telah dikenakan sanksi mutasi dari lokasi penempatan tugas.<sup>11</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

---

<sup>11</sup> Sumber Data Wawancara : Kepala Kasat Reskrim Kepolisian Resor Parigi Moutong Ibtu Dadi Rahma Putra,Parigi Rabu 04 November 2015.

Dari analisa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian penulis, yaitu :

1. Kepolisian Wilayah Parigi Kabupaten Moutong tidak sepenuhnya menerapkan Prinsip *Miranda Rule*, dikarenakan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan tersangka hak yang di berikan tidak semuanya di berlakukan. Pihak Kepolisian Resor Parigi Kabupaten Moutong memberikan hak tersangka dengan di beritahukan apakah ingin di dampingi oleh panasehat Hukum atau Advokat, namun hal tersebut tidak sepenuhnya tersangka terima karena Bantuan Hukum tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma
2. Pemberian sanksi bagi anggota Kepolisian Resor Kabupaten Parigi Moutong yang sengaja melakukan penyimpangan

terhadap Prinsip *Miranda Rule* telah di jatuhi hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu, penundaan kenaikan pangkat serta mutasi dan pembebasan dari jabatan, dan sanksi yang diberikan kepada pegawai penyidik Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Parigi Moutong adalah yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dikenakan hukuman tindakan pengguguran dari tugas penyidikan dan pembebasan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan dan saat ini anggota tersebut telah dikenakan sanksi mutasi dari lokasi penempatan tugas.

## **B. Saran**

Sebagaimana penulis telah uraikan pada kesimpulan di atas, maka penerapan prinsip *Miranda Rule* dan penerapan sanksi terhadap penegak

hukum agar terlaksana secara maksimal, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya prosedur yang ketat terhadap anggota Kepolisian Resor Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan proses penyidikan perkara pidana sehingga prinsip *Miranda Rule* tidak terabaikan oleh penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Resor Kabupaten Parigi Moutong.

3.

2. Perlunya peningkatan penegak hukum dalam melaksanakan kode etik Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Parigi Moutong sehingga penegak hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada masyarakat tetapi juga memberikan sanksi kepada anggota kepolisian bagi melanggar Prinsip *Miranda Rule* dan Kode Etik Kepolisian sehingga mewujudkan asas keseimbangan kepentingan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Hak Mendapat Bantuan Hukum* ,Penerbit Mandar Maju , Bandung, 2001. Hlm 33.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 56.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia* PT.Alumni, Bandung 2007. Hlm 167.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*,Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 327.
- Syukri Akub, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Mahakarya Rangkang Offset, Yokyakarta, 2012. Hlm 152.



|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NAMA</b>                 | <b>: ZAINUDDIN</b>               |
| <b>TEMPAT/TANGGAL LAHIR</b> | <b>: GUNUNG MERAH 10-03-1993</b> |
| <b>AGAMA</b>                | <b>: ISLAM</b>                   |
| <b>ALAMAT</b>               | <b>: JLN KIRANA MAMBORO</b>      |
| <b>NO. TELPON/ HP</b>       | <b>: 085394100317</b>            |
| <b>E-MAIL</b>               | <b>: Puankramank@gmail.com</b>   |

